

## Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan *Whistleblowing System* Terhadap Potensi Terjadinya *Fraud* Pada BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022

Dwi Aprilia Sakinah<sup>1</sup>, Reno Fithri Meuthia<sup>2</sup>, Anda Dwiharyadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, [dwiapriliasakina0@gmail.com](mailto:dwiapriliasakina0@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, [enofm87@gmail.com](mailto:enofm87@gmail.com)

<sup>3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, [anda.dwiharyadi@gmail.com](mailto:anda.dwiharyadi@gmail.com)

### ABSTRACT

*Keywords:*  
*Audit Committee,*  
*Whistleblowing system,*  
*Fraud*

*Received : 26 September 2023*

*Accepted : 30 November 2023*

*Published : 30 November 2023*

*This study aims to examine the effect of audit committee independence, number of audit committee meetings, audit committee financial expertise and whistleblowing system on the potential for fraud. The study population is State-Owned Enterprises (SOEs) listed on the IDX in 2020-2022. Samples were determined by purposive sampling and 20 samples were obtained. The hypothesis in this study was tested using multiple linear regression. The results showed that the independence of the audit committee did not affect the potential for fraud. The number of audit committee meetings, audit committee financial expertise, and whistleblowing system affect the potential for fraud. The implications of this research can be useful as a consideration for companies in making policies related to the potential for fraud.*

### Pendahuluan

Kecurangan (*fraud*) adalah topik yang sering menjadi bahan utama berita baik di media masa maupun media elektronik. Kecurangan dapat terjadi dimana saja seperti organisasi nonprofit, perusahaan, dan lembaga pemerintahan. Survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners Global (2019) menunjukkan bahwa *fraud* adalah bahaya yang mengancam dunia sebab bukan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia dan juga negara-negara maju lainnya. Setiap tahunnya ada sekitar 5% dari pendapatan kotor organisasi/perusahaan menjadi korban kecurangan (*fraud*). Kecurangan dapat juga dibuktikan dari penyalahgunaan aset, manipulasi pajak, laporan keuangan, dan penyuaan individu ke lembaga pemerintahan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setiap tahunnya ditemukan melakukan kecurangan (*fraud*). Editorial Board (2023) memberitakan kasus kecurangan berasal dari BUMN yaitu oleh PT. Garuda Indonesia pada tahun 2018 dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan rekayasa keuangan. Pada laporan keuangan yang mereka tulis mereka mendapatkan laba sebesar US\$ 800 juta sedangkan kenyataannya mereka mengalami kerugian sebesar US\$ 179 juta. Oleh karena itu OJK memberikan denda kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp 1,25 miliar.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 salah satu struktur tata kelola yang memiliki tugas serta bertanggung jawab terkait kecurangan yaitu komite audit. Komite audit adalah komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dengan audit eksternal, auditor internal serta anggota independen yang memiliki tugas dalam memberikan pengawasan auditor. Komite audit dapat menjalankan tugasnya dengan efektif memiliki

karakteristik, dimana variabel dari karakteristik itu sendiri antara lain independensi komite audit, keahlian keuangan yang di miliki oleh anggota komite audit serta jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit.

Pada tahun 2008 Komite Nasional Kebijakan *Governance* merilis sistem pelaporan pelanggaran. Sistem ini berada dibawah komite audit dan hasil dari pelaporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh audit internal. Laporan yang dimaksud disini adalah laporan dari pihak intern atau manajemen perusahaan melalui *whistleblowing system* (KNKG, 2008). Efektivitas sistem tersebut terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) dengan judul "Pengaruh Audit Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan Perusahaan Sektor Jasa di Bursa Efek Indonesia" yang memiliki hasil keberadaan *whistleblowing system* dapat menurunkan kasus kecurangan yang terjadi terutama pada perusahaan sektor jasa. Selain itu, penelitian ini juga merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Rumapea et al. (2022) dengan judul " Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia", dengan hasil yang didapatkan dari penelitian Rumapea et al. (2022) yaitu karakteristik komite audit dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penipuan pelaporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh indepenensi komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian keuangan komite audit dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud* pada BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.

## **Teori Agensi**

Teori agensi memiliki hubungan yang erat dengan *corporate governance* (Mustapha & Che Ahmad, 2011). *Agency theory* suatu fondasi untuk memahami *corporate governance* itu sebabnya hubungan antara *agency theory* antara *corporate governance*. perusahaan menerapkan *corporate governance* maka fungsi monitoring dan control terhadap laporan keuangan dan kinerja manajemen pada perusahaan akan mengalami peningkatan. Salah satu bagian dari *corporate governance* yaitu komite audit.

## **Independensi Komite Audit**

Menurut Suginam (2017) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2019) dan menunjukkan efektifitas komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kecurangan, dimana independensi termasuk salah satu komponen yang ada dalam penelitian tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Trijayanti et al. (2021) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dimana indikator komite audit yang diteli yaitu independensi komite audit. Berdasarkan analisis tersebut, didapat hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H1: Independensi komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*.

### **Jumlah Rapat Komite Audit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali tiga bulan. Jumlah rapat komite audit adalah jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh komite audit untuk pemenuhan fungsi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurliasari & Tarmizi (2020) dimana juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara rapat komite audit dengan dengan pengungkapan kecurangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Roy & Kuntadi (2020) menyatakan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap mendeteksi kecurangan. Berdasarkan analisis tersebut, didapat hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2: Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*.

### **Keahlian Keuangan Komite Audit**

Keahlian keuangan komite audit adalah anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa anggota komite audit wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan serta keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

Adapun penelitian yang dilakukan Leo & Ashari (2017) menyatakan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kecurangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Astrawan & Achmad (2023) menyatakan bahwa keahlian keuangan komite audit berepbnagaruh positif terhadap pendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan analisis tersebut, didapat hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H3: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*.

### **Whistleblowing System**

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008), whistleblowing system adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Surbakti (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh & Nurhidayati (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*.

### **Potensi Terjadinya *Fraud***

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang mencakup cara-cara yang dilakukan seseorang dengan kecerdikannya untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar (Tunggal, 2016). Potensi terjadinya *fraud* merupakan besarnya kemungkinan terdapatnya kecurangan yang terjadi pada suatu perusahaan.

## Metode Penelitian

### Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah area generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan setelahnya akan ditarik kesimpulan. Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive* sampling yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Perusahaan BUMN yang mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2020-2022.
3. Laporan tahunan perusahaan yang memiliki data lengkap mengenai komite audit.

### Jenis Data dan Operasional Variabel

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sampel. Menurut Sugiyono (2019) data sekunder merupakan data yang tidak langsung diberikan data kepada peneliti, misalnya seperti penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen terkait Data yang diambil berupa dokumen yang didapat diunduh dalam halaman *website* perusahaan terkait maupun situs BEI. Pengukuran variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Pengukuran Variabel

Variabel	Skala Pengukuran	Pengukuran	Indikator
Independensi komite audit (IKA)	Rasio	$IKA = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit yang Independen}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}} \times 100\%$	Nur & Sulhani (2017)
Jumlah rapat komite audit (JRKA)	Nominal	JRKA= Jumlah Rapat Komite Audit Selama Satu Tahun	Febriana & Christiawan (2020)
Keahlian keuangan komite audit (KKKA)	Rasio	$KKKA = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit yang Memiliki Keahlian Keuangan}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}} \times 100\%$	Nur & Sulhani (2017)
Whistleblowing system (WBS)	Rasio	$WBS = \frac{\text{Jumlah Item KNKG yang Dilaksanakan Perusahaan}}{\text{Jumlah Item Menurut KNKG}} \times 100\%$	Gulo (2020)
Potensi terjadinya fraud (PTF)	Nominal	PK= Jumlah Kasus Kecurangan yang Dilaporkan dalam Periode Tersebut	Albrecht (2017)

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan model regresi linear berganda, yaitu:

$$PTF = \alpha + \beta_1 IKA + \beta_2 JRKA + \beta_3 KKKA + \beta_4 WBS + e$$

Keterangan:

PTF = Potensi Terjadinya *Fraud* (*Dependent Variable*)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

IKA = Independensi Komite Audit (*Independent Variable*)

JRKA = Jumlah Rapat Komite Audit (*Independent Variable*)

KKKA = Keahlian Keuangan Komite Audit (*Independent Variable*)

WBS = *Whistleblowing System* (*Independent Variable*)

e = *Standard Error*

## Hasil dan Pembahasan

### Deskriptif Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh 20 sampel data BUMN 2020-2022, yaitu:

Tabel 2 Objek Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.	24
2	Perusahaan BUMN yang mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2020-2022.	(3)
3	Laporan tahunan perusahaan yang memiliki data lengkap mengenai komite audit.	(1)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria selama setahun		20
Total jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode penelitian (3 tahun)		60

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

### Analisis Statistik Deskriptif

Pada tabel di bawah ini menampilkan hasil statistik deskriptif dari 5 variabel yang digunakan didalam penelitian ini yaitu independensi komite audit (IKA), rapat komite audit (JRKA), keahlian keuangan komite audit (KKKA), *whistleblowing system* (WBS), dan potensi terjadinya *fraud* (PTF). Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Independensi Komite Audit (IKA)	60	0.88	1.00	0.99	0.02
Jumlah Rapat Komite Audit (JRKA)	60	4.00	62.00	23.92	13.58
Keahlian Keuangan Komite Audit (KKKA)	60	0.33	1.00	0.75	0.21
<i>Whistleblowing System</i> (WBS)	60	0.56	0.94	0.75	0.11
Potensi Terjadinya <i>Fraud</i> (PTF)	60	0.00	30.00	5.53	8.04
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Output SPSS versi 25 (Data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 3 diatas, jumlah sampel yang diteliti selama periode penelitian sebanyak 60 sampel. Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel pada variabel independensi komite audit sebesar 0,99 dengan standar deviasi sebesar 0,02. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata hampir seluruh anggota komite audit pada perusahaan sampel memiliki sikap independen. Nilai rata-rata dari seluruh sampel pada variabel jumlah rapat komite audit sebesar 23,92 dengan nilai standar deviasi sebesar 13,58. Hal ini berarti komite audit rata-rata mengadakan rapat sebanyak 24 kali dalam setahun. Nilai rata-rata dari seluruh sampel pada variabel keahlian keuangan komite audit sebesar 0,75 dengan nilai standar deviasi 0,21.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu rata-rata hampir seluruh anggota komite audit pada seluruh perusahaan sampel memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi. Nilai rata-rata yang didapat dari seluruh sampel pada variabel *whistleblowing system* sebesar 0,75 dengan standar deviasi 0,11. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu seluruh perusahaan sampel *whistleblowing system* telah menjalankan ketentuan dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008). Nilai rata-rata yang didapat dari seluruh sampel pada variabel potensi terjadinya *fraud* sebesar 5,53. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu masih ada diantara perusahaan sampel yang masih belum mengungkapkan kecurangan laporan keuangan.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda mendapatkan persamaan regresi yang terbentuk seperti berikut:

$$PTF = -2,248 + 5,580 IKA - 0,019 JRKA - 1,740 KKKA - 1,705 WBS + e$$

Keterangan:

PTF = Potensi terjadinya *fraud*

IKA = Independensi komite audit

JRKA = Jumlah rapat komite audit

KKKA = Keahlian keuangan komite audit

WBS = *Whistleblowing system*

e = *Standard Error*

### Koefisiensi Determinasi

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.587 <sup>a</sup>	0.345	0.297	0.694
a. Predictors: (Constant), Independensi Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, <i>Whistleblowing System</i>				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,297 atau 29,7%, hal ini dapat menunjukkan bahwa independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian keuangan komite audit dan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud* dengan cukup baik karena nilai

*adjusted R square* mendekati nilai 1 atau 100%. Berdasarkan tabel 5 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu potensi terjadinya *fraud* dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian keuangan komite audit dan *whistleblowing system* sebesar 0,297 atau 29,7 % sedangkan untuk sisanya sebesar 70,3% dapat dipengaruhi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Interpretasi Hasil

Asumsi interpretasi hasil, jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Namun jika sebaliknya maka  $H_0$  ditolak. nilai  $t_{tabel}$  pada penelitian ini sebesar 1,673. Berikut tabel interpretasi hasil sebagai berikut:

Tabel 6 Interpretasi Hasil

Hipotesis	t	Sig.	Kesimpulan
H1: Independensi komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya <i>fraud</i>	0.950	0.346	H1 ditolak
H2: Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya <i>fraud</i>	-2.811	0.007	H2 diterima
H3: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya <i>fraud</i>	-3.928	0.000	H3 diterima
H4: <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap potensi terjadinya <i>fraud</i>	-2.011	0.049	H4 diterima

Sumber: *Output SPSS* versi 25 (Data diolah, 2023)

### Hipotesis 1

Hipotesis pertama menyatakan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji T) pada tabel 4.9 dengan nilai  $t_{hitung} 0,376 < 1,673$  dan nilai signifikansi  $0,346 > 0,05$ , maka H1 ditolak karena independensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*. Hal tersebut menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud* pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurliasari & Tarmizi (2020) yang menunjukkan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya sejalan dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Fitriyani & Noviyanti (2021), yang menunjukkan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal itu berarti bahwa jumlah anggota komite audit yang independen tidak dapat berkontribusi dalam mengurangi kecurangan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*.

### Hipotesis 2

Hipotesis kedua menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji T) pada tabel 4.9 dengan nilai  $t_{hitung} 2,811 > 1,673$  dan nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$ , maka H2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat satu kali dalam tiga bulan. Hal ini berarti bahwa jika komite audit mengadakan rapat setiap bulan atau dua kali dalam sebulan, akan dapat berpotensi mengurangi terjadinya kecurangan

pada laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardani et al. (2020) bahwa jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan. Penjelasan dari hasil ini dapat menunjukkan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan lebih dari sekali tiga bulan akan lebih relatif mudah untuk mengawasi manajemen dan mencegah manajemen untuk melakukan kecurangan, serta berfungsi dengan baik dalam memantau masalah-masalah seperti kecurangan laporan keuangan.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu variabel jumlah rapat komite audit mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud*, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 terbukti secara statistik.

### **Hipotesis 3**

Hipotesis ketiga menyatakan keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji T) pada tabel 4.9 dengan nilai  $t_{hitung} 3,928 > 1,673$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada penelitian ini, menunjukkan bahwa 75% perusahaan sampel memiliki anggota komite audit yang ahli keuangan dan akuntansi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi, berpotensi akan dapat mengurangi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit sekurang-kurangnya satu anggota yang memiliki keahlian keuangan atau akuntansi, dimana komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kegiatan manajemen dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Leo & Ashari (2017) menyatakan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas yaitu variabel keahlian keuangan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud*, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud* pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 terbukti secara statistik.

### **Hipotesis 4**

Hipotesis keempat *whistleblowing system* berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud*. Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji T) pada tabel 4.9 dengan nilai  $t_{hitung} 2,011 > 1,673$  dan nilai signifikansi  $0,049 < 0,05$ , maka H4 diterima, dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gulo (2020), dan Puspita (2021) yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan.

Tujuan dari pembentukan *whistleblowing system* tentang sarana resmi yang digunakan untuk melaporkan jika mencurigai adanya perbuatan yang salah dan

pelapor tersebut dilindungi, bahkan dilindungi oleh undang-undang serta mekanisme yang sistematis dalam menyelesaikan laporan tersebut. Pada masa yang akan datang, efektifnya pengaplikasian *whistleblowing system* pada suatu perusahaan, maka akan dapat mengurangi jumlah kecurangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kecurangan karena pelaporan tidak segan untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut. Dengan adanya laporan *whistleblowing system* perusahaan dapat memantau secara langsung kecurangan-kecurangan yang terjadi dan dapat mengatasi secara lebih efektif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas yaitu variabel *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud*, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud* BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 terbukti secara statistik.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian keuangan komite audit dan *whistleblowing system* terhadap potensi terjadinya *fraud*. Hasil analisis data dan pembahasan mengenai independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, keahlian keuangan komite audit dan *whistleblowing system* terhadap potensi terjadinya *fraud* yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap potensi terjadinya *fraud* keuangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit yang independen tidak dapat mengurangi potensi kecurangan, kondisi inilah yang menunjukkan bahwa masih terdapat kecurangan pada BUMN meskipun jumlah komite audit yang independen telah mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Jumlah rapat komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap potensi terjadinya *fraud* pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti bahwa jumlah rapat komite audit harus menjadi perhatian khusus bagi BUMN karena dapat mengurangi potensi kecurangan.
3. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap dapat mengurangi potensi kecurangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti bahwa keahlian keuangan anggota komite audit dapat mengurangi potensi kecurangan. Dengan demikian dalam menentukan komite audit maka BUMN disarankan untuk mempertimbangkan keahlian keuangan dari komite audit tersebut.
4. *Whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan terhadap dapat mengurangi potensi kecurangan pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam mengelola BUMN diharapkan mengikuti item-item pengendalian *whistleblowing system* yang tertuang dalam KNKG.
5. Dari sisi teori agensi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dan *whistleblowing system* dapat menjadi pihak yang mengurangi *agency problem*.

## Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun yang menjadi keterbatasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih menggunakan tiga variabel dari karakteristik komite audit, masih ada variabel lain dari karakteristik komite audit yang belum digunakan pada penelitian ini seperti masa jabatan komite audit, anggota komite yang memiliki keterkaitan dengan partai politik dan lainnya.
2. Penelitian ini memilih rentang waktu yang relatif singkat yaitu 2020 – 2022.

## Saran

- 1) Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan sebaiknya tidak menggunakan variabel independensi, karena kemungkinan akan menghasilkan hasil yang sama dengan telah peneliti lakukan.
- 2) Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk dapat menambah variabel lain diluar variabel yang telah diteliti pada penelitian ini.
- 3) Peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk dapat memperpanjang periode penelitian.

## Referensi

- Association of Certified Fraud Examiners Global/ACFE Indonesia Chapter*. (2019). *Survei Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE INDONESIA CHAPTER.
- BAPEPAM, L. K. (2003). Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) nomor Kep-41/PM/2003. tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. [www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com).
- Budi Prasetyo, A. (2014). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 11(1), 1-24.
- Editorial Board. (2023, June 14). BEI diserang *fraud*. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/06/13/accounting-frauds-hit-idx.html>
- Febriana, V., & Christiawan, Y. J. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress Dengan Penerapan Sistem *Whistleblowing* Sebagai Variabel Moderasi. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 237.
- Fitriyani, F., & Noviyanti, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas, dan Independensi Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan BEI. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(1), 738-754.
- Gulo, C. F. (2020). Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan *Whistleblowing system* terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). *Q North-Holland Publishing Company*.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). (2008). Sistem Pelaporan Pelanggaran– SPP (*Whistleblowing System–WBS*). Jakarta. [www.governance-](http://www.governance-)

[indonesia.com](http://indonesia.com)

- Mardani, Mutia Basri, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 16 Volume 1 Tahun 2020.
- Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, *Whistleblowing System*, Pengungkapan Kecurangan Dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 249–270. <https://doi.org/10.24815/Idab.V4i2.7704>
- Nurliasari, K. E., & Ahmad Tarmizi. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 9 (1).1-12.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. (2004). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal. (2004). Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta.
- Puspita, D. (2021). Pengaruh Peran Komite Audit, Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Dan *Whistleblowing System* Terhadap Kecurangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Juripol*, 4(1), 178–183. <https://doi.org/10.33395/Juripol.V4i1.11025>
- Rumapea, M., Elisabeth, D. M., & Monica, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 5(2), 136-144.
- Siregar, A., & Surbakti, A. S. (2020). Analisis Pengaruh *Whistleblowing System* Dan Rapat Komite Audit Terhadap Jumlah Kecurangan. *Balance: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.25170/Balance.V16i1.1286>
- Sugiyono. (2019). Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Trijayanti, I., Hendri, N., & Sari, G. P. (2021). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Business And Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 30–42.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto. (2019). Efektivitas Komite Audit Dan Audit Internal Terhadap Kasus Kecurangan Dengan *Whistleblowing System* Sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), NTB, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1570–1600.